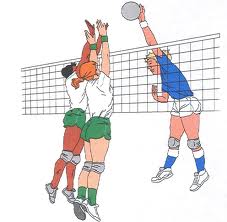
**Kasus Hibah KONI Jogja**

Ketua PBVSI dituntut 1,5 tahun penjara



**Ilustrasi: fuadmje.wordpress.com**

**Harianjogja.com, JOGJA**-Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Wahyono Haryadi dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, Selasa (26/5/2015).Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Sri Mumpuni itu, terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU Diliana menguraikan terdakwa menggunakan dana hibah PBVSI untuk Persatuan Bola Voli (PBV) Yuso dengan laporan pertanggungjawaban fiktif.

“Akibatnya negara dirugikan Rp537,4 juta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK,” sebutnya.

Pada 2012, jelas dia, terdakwa mengajukan permohonan dana hibah ke KONI Jogja senilai Rp999,9 juta. Sekitar Maret, terdakwa mengajukan pencairan tahap pertama sejumlah Rp646 juta. Setelah dana cair, Rp250 juta digunakan untuk membiayai kegiatan PBV Yuso yakni Pro Liga 2012.

“Padahal, kegiatan itu tidak tercatat saat mengajukan dana hibah,” kata Diliana.

Ditambahkannya, bukti administrasi juga tidak lengkap dan tidak sah. Penasihat hukum terdakwa, Beni Parwadi mengatakan segera mengajukan pledoi setelah tuntutan.

“Kami susun pembelaan dan paparkan dalam sidang selanjutnya,” tandas dia.

Sumber Berita:

1. jogja.solopos.com : Kasus Hibah KONI Jogja Ketua PBVSI dituntut 1,5 tahun penjara, 28 Mei 2015.
2. Sindo, 27 Mei 2015 Halaman 11.

Catatan Berita:

* Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14).
* Pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan Hibah dapat diberikan kepada:

(1) Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.